



LAPORAN KEUANGAN

UAKPA Tahun 2025 Audited

**Catatan Atas Laporan
Keuangan**

Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III
Harun Thohir Gresik



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik adalah salah satu entitas di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gresik, 7 Mei 2026

Kepala Kantor,



Febria Setyowati Suyanto
NIP. 198402072008122003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	56



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HARUN THOHIR

Jl. Raya Bandar Udara
HarunThohir No. 01
Bawean-Gresik 61182

Telp.(0325) 424443
Fax. (0325) 424443

Email : bandaraharunthohir@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gresik, 7 Mei 2026

Kepala Kantor,



Febria Setyowati Suyanto

NIP. 19840207 200812 2 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 101.439.525 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.101.439.525 atau mencapai 87,27 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.116.234.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11.044.069.345 atau mencapai 78,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.984.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.21.739.171.0064 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 52.999.386; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.21.686.171.678 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.21.739.171.064.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp101.439.525, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.823.194.677 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-8.721.755.152. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.721.755.152.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp19.518.296.396 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-8.721.755.152 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.942.629.820 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp21.739.171.064.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HARUN THOHIR GRESIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	116.234.000	101.439.525	87,27	88.765.803
JUMLAH PENDAPATAN		116.234.000	101.439.525	87,27	88.765.803
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.049.858.000	4.022.219.065	99,32	2.144.698.445
Belanja Barang	B.2.2	4.472.826.000	2.915.228.851	65,18	4.588.397.533
Belanja Modal	B.2.3	5.478.300.000	4.106.621.429	74,96	812.296.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		14.000.984.000	11.044.069.345	78,88	7.545.391.978

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HARUN THOHIR
GRESIK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ang	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perb	C.14	-	-
Persediaan	C.15	52.999.386	4.530.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		52.999.386	4.530.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	18.990.218.846	18.125.622.417
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	14.090.363.085	12.939.723.085
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	93.254.116.200	91.361.011.200
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(104.648.526.453)	(102.912.590.306)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		21.686.171.678	19.513.766.396
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		21.739.171.064	19.518.296.396
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	21.739.171.064	19.518.296.396
JUMLAH EKUITAS		21.739.171.064	19.518.296.396
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21.739.171.064	19.518.296.396

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HARUN THOHIR
GRESIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	101.439.525	88.763.811
Jumlah Pendapatan		101.439.525	88.763.811
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	4.022.219.065	2.144.698.445
Beban Persediaan	D.4	330.799.614	91.591.000
Beban Barang dan Jasa	D.5	677.518.793	1.699.625.991
Beban Pemeliharaan	D.6	2.021.737.689	2.229.666.800
Beban Perjalanan Dinas	D.7	34.983.369	564.031.742
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1.735.936.147	2.323.592.585
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		8.823.194.677	9.053.206.563
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(8.721.755.152)	(8.964.442.752)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	1.992
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	1.992
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(8.721.755.152)	(8.964.440.760)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(8.721.755.152)	(8.964.440.760)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HARUN THOHIR
GRESIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	19.518.296.396	21.026.110.981
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(8.721.755.152)	(8.964.440.760)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	10.942.629.820	7.456.626.175
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.220.874.668	(1.507.814.585)
EKUITAS AKHIR	E.6	21.739.171.064	19.518.296.396

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata

uang asing di translasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu

juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit	10

Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir Gresik* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan beberapa akun belanja pemerintah. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	116.234.000	116.234.000
Jumlah Pendapatan	116.234.000	116.234.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.198.788.000	4.049.858.000
Belanja Barang	4.405.014.000	4.472.826.000
Belanja Modal	3.649.300.000	5.478.300.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	10.253.102.000	14.000.984.000

Realisasi

Pendapatan

Rp101.439.525

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp101.439.525 atau

mencapai 87,27 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp116.234.000. Pendapatan Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp101.439.525. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	116.234.000	101.439.525	87,27
Jumlah	116.234.000	101.439.525	87,27

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 14,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	101.439.525	88.765.803	14,28
Jumlah	101.439.525	88.765.803	14,28

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA
2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp101.439.525 dan Rp88.765.803. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,28% dari TA 2024. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	101.439.525	88.765.803	14,28
Jumlah	101.439.525	88.765.803	14,28

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	988.365	100,00
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	98.979.233	87.775.446	12,76
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.992	100,00

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.460.292	-	-
Jumlah	101.439.525	88.765.803	14,28

Realisasi

Belanja

Rp11.044.069.345

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp11.0044.069.345 atau 78,88% dari anggaran belanja sebesar Rp14.000.984.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

Uraian	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4.049.858.000	4.022.219.065	99,32
Belanja Barang	4.472.826.000	2.915.228.851	65,18
Belanja Modal	5.478.300.000	4.106.621.429	74,96
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	14.000.984.000	11.044.096.345	78,88

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 46,37% Kenaikan Realisasi Belanja Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya sebab Tahun 2025 dilakukan percepatan penyerapan anggaran dan meningkatnya anggaran belanja barang. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Pegawai	4.022.219.065	2.144.698.445	87,54
Belanja Barang	2.915.228.851	4.588.397.533	(36,47)
Belanja Modal	4.106.621.429	812.296.000	405,56
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	11.044.069.345	7.545.391.978	46,37

*Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp4.022.219.065*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.022.219.065 dan Rp2.144.698.445. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 86,00% dari TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak Ada Belanja Pegawai akun 51.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	974.472.180	707.744.520	37,69
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.829	15.929	18,21
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30.394.970	27.877.610	9,03
Belanja Tunj. Anak PNS	9.907.646	9.470.608	4,61
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	5.400.000	40,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	38.200.000	24.160.000	58,11
Belanja Tunj. PPh PNS	2.719.403	2.595.665	4,77
Belanja Tunj. Beras PNS	42.438.120	32.730.000	29,56
Belanja Tunj. Makan PNS	199.812.000	111.122.000	79,81
Belanja Tunjangan Umum PNS	41.750.000	32.730.000	27,56
Belanja Uang Lembur	102.950.000	22.859.000	350,37
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.377.885.598	964.644.981	42,84
Belanja Gaji Pokok PPPK	451.583.700	80.046.400	464,15
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.770	1.812	328,81
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.280.000	7.280.000	-

Belanja Tunjangan Beras PPPK	32.589.000	2.172.600	1.400,00
Belanja Uang Makan PPPK	98.691.000	14.490.000	581,10
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	491.283.610	99.502.718	393,74
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	35.816.290	571.760	6.164,22
Belanja Uang Lembur PPPK	45.079.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.990.439.116	2.145.419.433	86,00
Pengembalian Belanja Pegawai	1.260.141	720.988	74,78
Jumlah Belanja	3.989.178.975	2.144.698.445	86,00

Realisasi

Belanja

Barang

Rp2.915.228.851

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.915.228.851 dan Rp4.588.397.533. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 36,47% dari Realisasi TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Barang Operasional	481.110.000	1.344.233.249	(64,21)
Belanja Barang Non Operasional	10.000.000	87.149.200	(88,53)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	30.075.000	(100,00)
Belanja Jasa	187.743.870	268.243.542	(30,01)
Belanja Pemeliharaan	2.210.886.689	2.294.664.800	(3,65)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	34.983.369	564.031.742	(93,80)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.924.723.928	4.588.397.533	(36,26)
Pengembalian Belanja Pegawai	9.495.077	-	-
Jumlah Belanja	2.915.228.851	4.588.397.533	(36,47)

Belanja Modal **B.2.3 Belanja Modal**

Rp4.106.621.429

Realisasi Belnja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.106.621.429 dan Rp812.296.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 405,56% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Tahun ini ada belanja modal peralatan mesin berupa pembelian laptop, printer dan AC.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.062.876.429	50.000.000	2.025,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.150.640.000	762.296.00	50,94
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	1.893.105.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.106.621.429	812.296.000	405,56
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4.106.621.429	812.296.000	405,56

Realisasi

Belanja Modal

Tanah Rp0

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisai tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Tidak Ada.

Perbandingan Belanja Modal Tanah 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin*

Rp1.062.876.429

B.2.3.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp 1.062.876.429 dan Rp50.000.000, mengalami kenaikan sebesar 2.025,75% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tahun ini ada belanja modal peralatan mesin berupa pembelian laptop, printer dan AC.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.062.876.429	50.000.000	2.025,75
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.062.876.429	50.000.000	2.025,75
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.062.876.429	50.000.000	2.025,75

Realisasi
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp1.150.640.000

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.150.640.000 dan Rp762.296.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 50,94% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak Ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.150.640.000	762.296.000	50,94
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.150.640.000	762.296.000	50,94
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.150.640.000	762.296.000	50,94

Realisasi
Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak Ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi
Belanja Modal
Lainnya
Rp1.893.105.000

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.893.105.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak Ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Modal Lainnya	1.893.105.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.893.105.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.893.105.000	-	-

Belanja
Bantuan
Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Tidak Ada

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Ro0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid) Rp0*

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh

namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut.

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Tahunan (Audited) 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Uang Muka Belanja
(prepayment)
Rp0*

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut:

*Rincian Uang Muka Belanja (prepayment)
Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0*

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset barang dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Perpajakan
Rp 0*

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited)
TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Perpajakan
Rp0*

**C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –
Piutang Perpajakan**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –
Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025
dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1.000.000	0,5%	5.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.000.000		5.000

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited)
TA 2025 dan 2024*

Jenis Piutang	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan
2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		

*Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Jenis Piutang	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0*

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan

TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0*

**C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		

Persediaan

Rp52.999.386

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp52.999.386 dan Rp4.530.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2023
Barang Konsumsi	52.999.386	4.530.000
-	-	-
-	-	-
Jumlah	52.999.386	4.530.000

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi Barang Persediaan Semua dalam keadaan baik

Persediaan yang

Belum Diregister

Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti Rugi
Rp0*

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Debitur	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0*

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024*

Debitur	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka

Panjang Lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2024
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Peralatan dan Mesin

Rp18.990.218.864

C.20 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp18.990.218.846 dan Rp18.125.622.417. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	18.125.622.417
Mutasi tambah:	
Jenis Transaksi	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Jenis Transaksi	-
Saldo per 31 Desember 2025	18.125.622.417
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(17.461.345.146)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	664.277.271

Gedung dan

Bangunan

Rp14.090.363.085

C.21 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.090.363.085 dan Rp12.939.723.085. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	12.939.723.085
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	12.939.723.085

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.795.137.109)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11.144.585.976

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp93.254.116.200

C.22 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.93.254.116.200 dan Rp.91.361.011.200. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	91.361.011.200
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	91.361.011.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(85.392.044.198)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.968.967.002

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada periode pelaporan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp104.648.526.453

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing

Rp104.648.526.453 dan Rp102.912.590.306. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahunan (Audited) Tahun 2025*

N o	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	18.990.218.846	(17.461.345.146)	1.528.873.700
2	Gedung dan Banguna n	14.090.363.085	(1.795.137.109)	12.295.225.976
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.254.116.200	(85.392.044.198)	7.862.072.002
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		126.334.698.13 1	(104.648.526.453)	21.686.171.67 8

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka

kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Realisasi T.A 2025	Realisasi T.A 2024
-	-	
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp21.739.171.064*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.739.171.064 dan Rp19.518.196.396. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp101.439.525*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp101.439.525 dan Rp88.763.811. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 14,28%. Hal tersebut disebabkan oleh. Rincian Pendapatan Negara

Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	988.365	(100)
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan//Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	98.979.233	87.775.446	12,76
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai	2.460.292	-	-
Jumlah	101.439.525	88.763.811	14,28

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp4.022.219.085

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.022.219.065 dan Rp2.144.698.445. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 87,54 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan Belanja Pegawai karena adanya penambahan pegawai CPNS dan PPPK. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	974.472.180	707.744.520	37,69
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.829	14.941	26,02
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.394.970	27.877.610	9,03
Beban Tunj. Anak PNS	9.907.646	9.470.608	4,61
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000	5.400.00	40,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.200.000	24.160.000	58,11
Beban Tunj. PPh PNS	2.719.403	2.595.655	4,77
Beban Tunj. Beras PNS	42.438.120	32.733.840	29,65

Beban Tunj. Makan PNS	199.812.000	111.122.000	79,81
Beban Tunjangan Umum PNS	40.389.859	32.010.000	26,49
Beban Uang Lembur	102.950.000	22.859.000	79,81
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.377.885.598	964.644.981	42,84
Beban Gaji Pokok PPPK	451.583.700	80.046.400	464,15
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.770	1.812	328,81
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7.280.000	7.280.000	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	32.589.000	2.172.600	1.400
Beban Uang Makan PPPK	98.691.000	14.490.000	581,10
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	491.283.610	99.502.718	393,74
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	35.816.290	571.760	6.164,22
Beban Tunjangan Umum PPPK	25.270.000	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	45.079.000	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	7.770.090	-	-
Jumlah	4.022.219.065	2.144.698.445	87,54

*Beban
Persediaan
Rp330.799.614*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp330.799.614 dan Rp91.591.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi

barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 261,17 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban persediaan disebabkan barang banyak belum terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024
dan 2023*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	330.799.614	91.591.000	261,17
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	330.799.614	91.591.000	261,17

*Beban Barang
dan Jasa
Rp677.518.793*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp677.518.793 dan Rp1.699.625.991. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 60,14 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan belanja barang disebabkan percepatan penyerapan anggaran di tahun 2025. Rincian Beban

Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	385.390.000	1.211.095.249	68,18
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95.720.000	102.960.000	7,03
Beban Barang Operasional Lainnya	-	19.916.00	100,00
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	10.000.000	77.799.200	87,15
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	9.350.000	100,00
Beban Langganan Listrik	148.406.993	152.084.537	2,42
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	-	-	-
Beban Jasa Profesi	-	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	10.262.000	100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	29.841.800	25.759.005	15,85
Beban Sewa	-	90.400.000	100,00
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	8.160.000	-	-
Jumlah	677.518.793	1.699.625.991	60,14

Beban

Pemeliharaan

Rp2.021.737.689

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.021.737.689 dan Rp2.229.666.800. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan dan Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai cukup besar tahun ini. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	654.002.000	892.623.000	26,73
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	462.679.689	684.549.800	32,41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	35.000.000	57,14
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	849.316.000	517.014.000	64,27
Beban Pemeliharaan Irigasi	40.740.000	100.480.000	59,45
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Jumlah	2.021.737.689	2.229.666.800	9,33

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp34.983.369*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.983.369 dan Rp564.031.742. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 93,80 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA
2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Perjalanan Biasa	34.983.369	564.031.742	93,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Jumlah	34.983.369	564.031.742	93,80

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Semester I TA 2025 dan 2024*

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.735.936.147*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.735.936.147 dan Rp2.323.592.585. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan
(Audited) TA 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	394.113.308	863.025.246	54,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	273.759.631	254.630.271	7,51
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.029.497.463	1.028.528.400	0,09
Beban Penyusutan Irigasi	27.032.766	165.875.689	83,70
Beban Penyusutan Jaringan	11.532.979	11.532.979	-
Jumlah Penyusutan	1.735.936.147	2.323.592.585	25,29
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.735.936.147	2.323.592.585	25,29

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester
I TA 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh NonMigas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp0

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Semester I TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A.2024	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp19.518.296.396,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.19.518.296.396,00 dan Rp.21.026.110.981,00.

Defisit LO

Rp8.721.755.152,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.721.755.15200 dan Rp8.964.440.760,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 DESEMBER 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 DESEMBER 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp0*

E.3.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 DESEMBER 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 DESEMBER 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan

kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 DESEMBER 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 DESEMBER 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi
Antar Entitas
Rp10.942.629.820

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.942.629.820 dan Rp7.456.626.175. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31
Desember Tahun 2025*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.044.069.345
Diterima dari Entitas Lain	(101.439.525)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	10.942.629.820

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp11.044.069.345, sedangkan DDEL sebesar minus Rp101.439.525.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas

lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Penembalian Hibah langsung	-	-
Jumlah		-

*Ekuitas Akhir
Rp21.739.171.064*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.739.171.064 dan Rp19.518.296.396.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KPPN SURABAYA I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 649047 - KANTOR UPBU HARUN THOHIR
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 07/05/26 6:50

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	14,000,984,000	14,000,984,000	0
2	Belanja	11,054,824,563	11,054,824,563	0
3	Pengembalian Belanja	-10,755,218	-10,755,218	0
4	Estimasi Pendapatan	116,234,000	116,234,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	101,439,525	101,439,525	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (649047) KANTOR UPBU HARUN THOHIR

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/26 6:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	52,999,386	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	18,990,218,846	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	14,090,363,085	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	86,372,409,200	0
0.0	134112	Irigasi	6,434,388,000	0
0.0	134113	Jaringan	447,319,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,461,345,146
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,795,137,109
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	79,022,297,063
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,239,852,451
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	129,894,684
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,044,069,345
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	101,439,525	0
0.0	391111	Ekuitas	0	19,518,296,396
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,460,292
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	98,979,233
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	974,472,180	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,829	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30,394,970	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,907,646	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	38,200,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,719,403	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	42,438,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	199,812,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	40,489,859	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	451,583,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,770	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	35,816,290	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	7,770,090	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,280,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	32,589,000	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	98,691,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	25,270,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	102,950,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	45,079,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,377,885,598	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	491,283,610	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (649047) KANTOR UPBU HARUN THOHIR

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/26 6:50 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	385,390,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,720,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	10,000,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,160,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	148,406,993	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	29,841,800	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	654,002,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	462,679,689	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	849,316,000	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	40,740,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34,983,369	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	394,113,308	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	273,759,631	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,029,497,463	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	27,032,766	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	11,532,979	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	330,799,614	0
JUMLAH			135,312,331,719	135,312,331,719

Keterangan :

FINAL

GRESIK, 7 Mei 2026

Peranggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FEBRIA SETYOWATI SUYANTO

NIP. 198402072008122003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU HARUN THOHIR 649047

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/26 6:51 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	116,234,000	101,439,525	(14,794,475)	87	262,390,000	88,765,803	173,624,197	34
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	116,234,000	101,439,525	(14,794,475)	87	262,390,000	88,765,803	173,624,197	34
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	116,234,000	101,439,525	(14,794,475)	87	262,390,000	88,765,803	173,624,197	34
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	14,000,984,000	11,044,069,345	(2,956,914,655)	79	7,919,947,000	7,545,391,978	374,555,022	95
1. Belanja Pegawai	4,049,858,000	4,022,219,065	(27,638,935)	99	2,153,702,000	2,144,698,445	9,003,555	100
2. Belanja Barang	4,472,826,000	2,915,228,851	(1,557,597,149)	65	4,848,445,000	4,588,397,533	260,047,467	95
3. Belanja Modal	5,478,300,000	4,106,621,429	(1,371,678,571)	75	917,800,000	812,296,000	105,504,000	89
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU HARUN THOHIR 649047

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/26 6:51 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,000,984,000	11,044,069,345	(2,956,914,655)	79	7,919,947,000	7,545,391,978	374,555,022	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

GRESIK, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FEBRIA SETYOWATI SUYANTO
NIP. 198402072008122003



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (649047) KANTOR UPBU HARUN THOHIR

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/26 6:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	52,999,386	4,530,000	48,469,386	1,069.96
JUMLAH ASET LANCAR	52,999,386	4,530,000	48,469,386	1,069.96
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	18,990,218,846	18,125,622,417	864,596,429	4.77
Gedung dan Bangunan	14,090,363,085	12,939,723,085	1,150,640,000	8.89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	93,254,116,200	91,361,011,200	1,893,105,000	2.07
AKUMULASI PENYUSUTAN	(104,648,526,453)	(102,912,590,306)	(1,735,936,147)	1.69
JUMLAH ASET TETAP	21,686,171,678	19,513,766,396	2,172,405,282	11.13
JUMLAH ASET	21,739,171,064	19,518,296,396	2,220,874,668	11.38

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,739,171,064	19,518,296,396	2,220,874,668	11.38
JUMLAH EKUITAS	21,739,171,064	19,518,296,396	2,220,874,668	11.38
JUMLAH EKUITAS	21,739,171,064	19,518,296,396	2,220,874,668	11.38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,739,171,064	19,518,296,396	2,220,874,668	11.38

Keterangan :

FINAL

GRESIK, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FEBRIA SETYOWATI SUYANTO

NIP. 198402072008122003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (649047) KANTOR UPBU HARUN THOHIR

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/26 6:51 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	101,439,525	88,763,811	12,675,714	14.28
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	101,439,525	88,763,811	12,675,714	14.28
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	101,439,525	88,763,811	12,675,714	14.28
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,022,219,065	2,144,698,445	1,877,520,620	87.542
Beban Persediaan	330,799,614	91,591,000	239,208,614	261.17
Beban Barang dan Jasa	677,518,793	1,699,625,991	(1,022,107,198)	(60.137)
Beban Pemeliharaan	2,021,737,689	2,229,666,800	(207,929,111)	(9.326)
Beban Perjalanan Dinas	34,983,369	564,031,742	(529,048,373)	(93.798)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (649047) KANTOR UPBU HARUN THOHIR

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/26 6:51 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,735,936,147	2,323,592,585	(587,656,438)	(25.291)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,823,194,677	9,053,206,563	(230,011,886)	(2.541)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,721,755,152)	(8,964,442,752)	242,687,600	(2.707)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,992	(1,992)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,992	(1,992)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	1,992	(1,992)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,721,755,152)	(8,964,440,760)	242,685,608	(2.707)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,721,755,152)	(8,964,440,760)	242,685,608	(2.707)

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FEBRIA SETYOWATI SUYANTO
NIP. 198402072008122003